

**IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2020 MELALUI E-YOUTEFA DI
KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

Oscar Fresza Radjazsa Koibur
NPP. 29.1807

*Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Kebijakan Publik
Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: oscarfrkoibur@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): This research is entitled "Implementation of the 2020 Regional Government Administration Report (LPPD) Through EYoutefa in Jayapura City, Papua Province". **Purpose:** This study aims to determine whether the implementation of the 2020 Regional Government Administration Report (LPPD) through EYoutefa in Jayapura City, Papua Province has been going well or not and to describe what factors are inhibiting and supporting the Regional Secretariat of the Governance Section of the Sub-Division of Government. Jayapura City General in the Preparation of Local Government Implementation Reports (LPPD). **Method:** This study uses qualitative research with a descriptive approach, data collection techniques through interviews and documentation. This study uses the Theory of Policy Implementation according to Edward III which contains 4 factors that influence the implementation of a public policy to see the Implementation of the Preparation of the Regional Government Administration Report (LPPD) which consists of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure factors. **Result:** The results of the study show that the Regional Secretariat of the Governance Section of the General Government Sub-Section in the Preparation of the Regional Government Administration Report (LPPD) of the Jayapura City Government in 2020 through E-Youtefa has not gone well. In the analysis of the Preparation of the 2020 Regional Government Implementation Report (LPPD) Through E-Youtefa. **Conclusion/Sugegestion:** The author found the lack of intensity of consultation by managers at the OPD level regarding the issue of preparation to the competent department in the preparation of LPPD, LPPD admins at each OPD have not been able to carry out filling through systems and influential networks in the application of this system. The efforts made were issuing an e-youtefa application procedure manual, mentoring and opening admin consultation activities (LPPD) at each OPD, controlling the LPPD data input process through group chats and infographic databases in the e-youtefa application.

Keywords: *Implementation, Preparation, Implementation Report*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul “Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui EYoutefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua”. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui EYoutefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua sudah berjalan baik atau tidak serta menguraikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sub Bagian Pemerintahan Umum Kota Jayapura dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III yang memuat 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik untuk melihat Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang terdiri dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. **Hasil/Temuan:** Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sub Bagian Pemerintahan Umum dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020 Melalui E-Youtefa belum berjalan dengan baik. Pada analisis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa. **Kesimpulan dan Saran:** Penulis menemukan kurangnya intensitas konsultasi oleh pengelola ditingkat OPD terkait permasalahan penyusunan ke bagian yang berkompeten dalam penyusunan LPPD, admin LPPD pada setiap OPD belum cakap melaksanakan pengisian melalui sistem dan jaringan berpengaruh dalam aplikasi sistem ini. Adapun upaya yang dilakukan yaitu mengeluarkan buku manual prosedur aplikasi e-youtefa, pendampingan dan pembukaan kegiatan konsultasi admin (LPPD) pada setiap OPD, pengontrolan proses penginputan data LPPD melalui grup chat serta database infografis di aplikasi e-youtefa.

Kata Kunci: *Implementasi, Penyusunan, Laporan Penyelenggaraan*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kerangka kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pengaturan dan pengelolaannya berdasarkan pada kepentingan masyarakat. Daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan, ketatalaksanaan, kualitas personil (birokrat), kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi sehingga otonomi daerah tidak dipandang hanya sebagai hak dan kewenangan tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab. Dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang meliputi kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kepentingan umum, keterbukaan, proporsi, profesionalisme, akuntabilitas efisiensi, efektivitas, dan ketidakberpihakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Maka, kepala daerah wajib melaporkan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 yang berbunyi: (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintahan Daerah. Pasal di atas mengimplikasikan bahwa setiap pemerintah wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat termasuk juga Pemerintah Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun sebagai pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran guna menciptakan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan sebagai bahan evaluasi bersama untuk dibenahi. Hal ini mengacu pula pada Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah, yang menyebutkan bahwa fungsi bagian pemerintahan adalah mengolah data dan informasi OPD dalam rangka penyusunan LKPJ dan LPPD Walikota. Pemerintah Kota Jayapura memiliki 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 9 Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan jumlah pegawai sebanyak 3.919 orang. Sedangkan OPD yang ada di Kota Jayapura terdiri dari 19 Dinas, 7 Badan, Setwan, Inspektorat, Sekretariat Daerah yang terdiri dari 6 Bagian dan 5 Distrik. Proses pelaporan LPPD melalui OPD kepada Pemerintah Kota Jayapura melalui bagian pemerintahan sebelum tahun 2019 masih dilakukan secara konvensional. Dimana setiap OPD menggunakan hardfile laporan yang terdiri dari suplemen data yang dibutuhkan dalam LPPD Kota Jayapura. Hal tersebut sangatlah tidak efisien karena memakan banyak biaya, waktu dan tenaga serta dinilai kurang efektif sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan data oleh OPD kepada bagian pemerintah kota, hal ini tentunya berpengaruh pula pada keterlambatan dalam penyerahan laporan oleh pemerintah Kota Jayapura ke pemerintah Provinsi Papua yang kemudian akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri dimana akan dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD pada daerah otonomi di seluruh Indonesia. Oleh karenanya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan LPPD, Pemerintah Kota Jayapura menciptakan sebuah inovasi berupa sebuah sistem penginputan data terintegrasi yang dinamakan e-youtefa. E-youtefa hadir guna menjawab tantangan teknologi disamping itu e-youtefa menghadirkan solusi nyata bagi sistem penginputan data yang sebelumnya dilakukan secara offline dan dinilai tidak efisien dan efektif menjadi berbasis data digital atau online. E-youtefa adalah sistem penginputan data LPPD yang dibentuk atas inisiatif pemerintah kota Jayapura pada tahun 2019. Sistem

ini dikelola dan diinput oleh Super Administrator yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Kota Jayapura sebagai admin utama serta admin pelaksana yang ada di setiap OPD. Pemerintah Kota Jayapura sendiri sebenarnya telah meraih peringkat pertama se-provinsi Papua dalam penyusunan laporan LPPD dari tahun 2013-2018. Namun dalam pemeringkatan secara nasional berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100-53 tahun 2018 menunjukkan bahwa peringkat kota Jayapura belum bisa optimal dalam lingkup nasional. Kota Jayapura berada diperingkat 56 dari 93 Daerah Kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan IKK atau indikator Kinerja Kunci pada LPPD, banyak OPD yang tidak melengkapi bukti penyerta sehingga terindikasi TDI (Tidak Diisi). Padahal bukti tersebut sangat penting dan diperhatikan oleh evaluator. Sehingga dengan berbagai keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan aplikasi e-youtefa diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan LPPD dan mengatasi kendala yang ada. Oleh karenanya, sistem ini merupakan jawaban yang tepat dan solusi yang alternatif dalam proses penginputan data dalam penyusunan LPPD Kota Jayapura. Namun sayangnya ada beberapa kendala dalam pelaksanaan sistem ini. Mulai dari rendahnya kualitas SDM, ketidak lengkapan data hingga keterlambatan pengumpulan laporan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pemerintah kota jayapura telah melakukan beberapa upaya guna mengatasi kendala tersebut. Mulai dari pelaksanaan bimbingan teknis pada tahun 2019 tentang sosialisasi penerapan e-youtefa hingga tindakan penegasan terhadap keterlambatan pengumpulan laporan berupa surat teguran dari Walikota Jayapura. Namun nyatanya masih banyak yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan sistem ini. Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu adanya implementasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dilaksanakan sesuai pedoman peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Karena dasar keberhasilan implementasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama dari Henry Nelson Momuat, dkk (2020). Judul penelitian Implementasi Laporan Penyelenggaraan n Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. Metode penelitian Penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Metode Penelitian Penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian Proses penyusunan LPPD di Sekeretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, Sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal karena kurang tersedianya data yang sesuai format, kurangnya komitmen dan motivasi pegawai, kompetensi SDM, kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta penilaian atas hasil kerja. Penelitian yang kedua yaitu dari Pradita Hakiki Arianda (2017). Judul penelitian Sistem Informasi Manajemen pada Lapora Penyelenggara n Pemerintahan Daerah (SIM LPPD) Kabupaten Banyuwangi. Metode Penelitian Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian Laporan Penyelenggar aan Pemerintahan

Daerah (LPPD) yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Kabupaten Banyuwangi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah diantaranya terkait data LPPD yang dikategorikan dalam data Tidak Diisi (TDI). Penelitian yang ketiga dari Elip Helda, dkk (2019). Judul penelitiannya Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro. Metode yang digunakan Penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Hasil penelitian Pelaksanaan penyusunan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro telah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Jayapura.

II. METODE

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dari segi tujuan, penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain) (Siyoto & Sodik, 2015:14). Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan makna atau pemahaman berbagai gejala permasalahan faktual yang ada di lokasi penelitian, berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya untuk dapat digambarkan, diungkapkan serta dijelaskan. Pendekatan deskriptif juga dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada serta penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Samsu, 2017:65). Pendekatan induktif yaitu peneliti lebih mementingkan membangun teori/ konsep/ proposisi yang berasal dari bawah (data empirik di lapangan). Selanjutnya, di resume (ditarik) ke dalam bentuk abstraksi. Dapat peneliti pahami bahwa, induktif itu sendiri lebih menekankan kepada cara berpikir untuk menemukan berbagai hipotesis di lapangan, lalu dikumpulkan data yang berguna untuk membuktikan hipotesis tersebut dan nantinya disesuaikan dengan teori yang telah ada, singkatnya yaitu dari empiris ke normatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua.

3.1.1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan seperti untuk dimensi-dimensi dalam Kegiatan Transmisi, kejelasan, konsistensi.

3.1.1.1. Transmisi Kebijakan

Transmisi adalah pendistribusian komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan hasil implementasi yang baik. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini adalah kesalah pahaman, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaannya telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Transmisi suatu kebijakan merupakan gambaran bagaimana kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi berbagai kegiatan dalam proses pemerintahan sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme komunikasinya adalah transmisi kebijakan, dimana pengambil kebijakan menyebar luaskan informasi kepada komponen komponen dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). Jika transmisi tidak dipahami dengan baik bisa menimbulkan kesalah pahaman pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang disampaikan oleh pengambil kebijakan. transmisi kebijakan Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua terbilang optimal karena penyaluran informasi mengenai penyusunan LPPD bukan hanya satu arah saja.

3.1.1.2. Kejelasan Kebijakan

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah kejelasan kebijakan, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghambat implementasi kebijakan, dimana pada level tertentu para pelaksana membutuhkan keluwesan dalam mengimplementasikan kebijakan. Kebijakan dari pemerintah Kota Jayapura kepada seluruh OPD terkait Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua sudah diketahui oleh seluruh OPD. Jadi dapat dikatakan terkait analisis kejelasan kebijakan di pemerintahan Kota jayapura sudah maksimal.

3.1.1.3. Konsistensi Kebijakan

Konsistensi informasi yang disampaikan merupakan perintah atau informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus jelas dan konsisten

untuk dilaksanakan dan dijalankan. Jika urutannya sering berubah, dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Kebijakan dapat diartikan sebagai rencana program, kegiatan, tindakan, keputusan, sikap, untuk bertindak atau tidak bertindak oleh para pihak (pelaku), sebagai tahapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan hal yang penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Berdasarkan informan, implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika implementasi kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpedoman pada prosedur dan norma yang berlaku. Konsistensi kebijakan dalam melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) melalui e-youtefa masih belum optimal dikarenakan masih terjadi beberapa pihak dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tahapan yang berlaku

3.1.2. Sumber Daya

Faktor berikutnya dalam melaksanakan program adalah sumber daya meliputi; sumber daya manusia (Staf), dan sumber daya peralatan.

3.1.2.1. Sumber Daya

Sumberdaya manusia merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kualitas dan kuantitas Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program sangat mempengaruhi, dimana kualitas sumberdaya manusia dalam Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua. Tingkat pendidikan para admin utama maupun admin bagian sudah sangat baik sehingga mampu bertanggung jawab dan memiliki skill dalam bekerja. Dengan memiliki sumber daya yang mampu seperti ini dapat memebentuk suatu kondisi dan jalannya pekerjaan yang optimal saat penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kota Jayapura melalui e-youtefa.

3.1.2.2. Fasilitas Pendukung

Faktor penunjang utama dalam bekerja adalah fasilitas sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan dalam pelaksanaan penyusunan LPPD Kota Jayapura. Fasilitas sarana dan prasarana penyusunan (LPPD) Kota Jayapura melalui e-youtefa sudah sangat baik sehingga dalam peyusunannya selama ini belum ada kendala yang di hadapi baik oleh admin utama maupaun admin pada setiap OPD.

3.1.3. Disposisi

Edwar III menjelaskan bahwa disposisi dan sikap pembuat kebijakan merupakan faktor penting dalam pendekatan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam menganalisis disposisi pada pemerintah Kota Jayapura yang menerapkan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)

melalui e-youtefa dengan dua indikator yaitu; respon implementor dan pengawasan.

3.1.3.1.Respon Implementor

Respon implementor terhadap suatu kebijakan berupa kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Seorang implementor harus memiliki pengetahuan terhadap suatu standar dan sasaran kebijakan, karena suatu implementasi bisa jadi gagal jika implementor tidak sepenuhnya mengetahui standar dan sasaran kebijakan, serta harus menentukan arah disposisi apakah menerima, netral, atau menolak. Sebagai salah satu bentuk untuk memperkuat indikator disposisi pada analisis terkait respon implementor dalam Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Jayapura tahun 2020 melalui e-youtefa. Respon implementor pada Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua, mengetahui tentang kebijakan dilaksanakan dengan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian pemerintah Kota Jayapura menduduki peringkat pertama terkait penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) karena lebih efektif dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Provinsi Papua.

3.1.3.2.Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas/kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya dalam melaksanakan suatu program. Namun masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai dalam melaksanakan suatu program. Dalam suatu kebijakan perlu dilakukan pengawasan agar pelaksanaannya dapat terkontrol dan mengurangi tingkat resistensi. Pengawasan dilakukan tidak hanya dilakukan untuk mengawasi kinerja orang lain, tetapi kinerja dari aktivitas kita sendiri agar mudah dalam perbaikan. Untuk meperkuat indikator pengawasan dan pengendalian proses penyelenggaraan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kota jayapura melalui e-youtefa. Pengawasan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kota Jayapura melalui e-youtefa dinilai lebih akurat. Dapat dilihat pada tabel komposisi status jumlah isian indikator kinerja kunci (IKK), status hijau adalah banyaknya data yang terisi, sedangkan status merah adalah banyaknya data yang

belum terisi dari jumlah IKK setiap OPD. Penilaian terhadap keterisian IKK setiap OPD dapat dilihat pada tabel kategori tingkat keterisian IKK. Penilaian tersebut secara otomatis terinput sesuai dengan berapa data yang terisi ataupun belum dengan jumlah IKK setiap OPD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan telah dilakukan dalam pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kota Jayapura melalui e-youtefa. Sangat perlu dilakukan pengawasan dan monitoring dalam program agar dapat menghindari terjadinya resistensi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

3.1.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah ciri, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam suatu badan eksekutif yang memiliki potensi dan hubungan nyata dalam melaksanakan suatu kebijakan. Aspek struktural penting dari suatu organisasi adalah adanya prosedur operasional standar (standard operating procedures atau SOP) Adapun struktur birokrasi pada penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) meliputi; Standar Operasional Prosedur Kebijakan dan Fragmentasi.

3.1.4.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebijakan

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman untuk setiap pelaksana ketika bertindak. Struktur organisasi yang panjang cenderung melemahkan pengawasan dan memperumit prosedur birokrasi. Hal ini membuat aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Standar Operasional Prosedur (SOP) dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. Indikator struktur birokrasi yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kota Jayapura melalui e-youtefa sudah ada tetapi hanya bersifat sementara atau belum dipatenkan.

3.1.4.2. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan Koordinasi. Dimana koordinasi merupakan suatu upaya yang sinkron dan teratur demi menyediakan jumlah serta waktu yang tepat, dan juga mengarahkan pelaksanaan untuk bisa melahirkan suatu tindakan yang selaras dan harmonis pada tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Dalam hubungan yang terjadi di suatu organisasi, koordinasi dan kerjasama sangat perlu dilakukan demi membantu kelancaran dalam menjalankan suatu kebijakan. Fragmentasi dari indikator struktur birokrasi dalam Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020 melalui E-youtefa

3.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua.

Bersumber pada hasil penelitian Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua tidak memiliki banyak hambatan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini, diketahui bahwasannya terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua. Faktor penghambat tersebut dapat diidentifikasi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

3.2.1. Faktor Eksternal

Hambatan yang sering terjadi dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), ditemukan bahwa banyak penyusun LPPD Bagian yang belum maksimal untuk melakukan konsultasi terkait permasalahan penyusunan ke Bagian Pemerintahan. Sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan informasi tidak bisa sampai kepada penerima dengan tepat. Tidak semua penyusun langsung mengerti dengan permintaan data yang dimaksud. Banyak dari mereka yang bahkan tidak tahu sama sekali bagaimana mencari data yang diminta. Meskipun demikian mereka kurang tanggap untuk mencari tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan mereka. Selain itu, banyak ditemukan admin LPPD pada setiap OPD belum cakap melaksanakan pengisian melalui sistem, terbukti dari masih banyaknya admin LPPD tiap OPD yang datang langsung ke kantor tata pemerintahan Kota Jayapura untuk meminta petunjuk dan arahan serta bimbingan ulang terhadap tatacara dan mekanisme inputting data LPPD pada sistem Dimana sistem sebagai penunjang untuk penyusunan LPPD nyatanya masih belum maksimal digunakan dan perlu banyak pengembangan. Contohnya ialah adanya permasalahan error pada proses inputting data yang menimbulkan kebingungan bagi admin yang nyatanya juga mayoritas masih belum mumpuni dalam penggunaan sistem.

3.2.2. Faktor Eksternal

Faktor teknis dalam pengisian LPPD muncul pada saat adanya gangguan sinyal/jaringan internet yang merupakan penunjang utama penggunaan sistem di wilayah Kota Jayapura. Hal tersebut sangat merugikan karena akan kehilangan banyak waktu guna mengejar efektivitas inputting data LPPD pada sistem. Selain itu adanya gangguan seperti jaringan internet yang berjalan lambat pada beberapa wilayah kampung maupun yang berjarak agak jauh dari pusat keramaian kota sehingga berpengaruh pada kecepatan inputting data LPPD OPD pada sistem e-youtefa.

3.3. Upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam mengatasi hambatan Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua

Pemerintah Kota Jayapura melalui bagian Pemerintahan Kota Jayapura melakukan berbagai upaya agar dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Jayapura melalui e-youtefa dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Jayapura dalam Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 melalui E-Youtefa sebagai berikut:

- 3.3.1. Mengeluarkan buku manual prosedur aplikasi e-youtefa sebagai bahan pegangan dalam penginputan data penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah(LPPD).
- 3.3.2. Pendampingan dan pembukaan kegiatan konsultasi admin (LPPD) pada setiap OPD
- 3.3.3. Pengontrolan proses penginputan data dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) setiap admin OPD melalui grup chatserta database infografis di aplikasi e-youtefa.
- 3.3.4. Pemerintah Kota Jayapura memberikan punishment bagi keterlambatan pengumpulan data melauai e-youtefa pada setiap OPD berupa surat peringatan walikota.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penyaluran informasi dalam penyusunan LPPD dengan melalui media sosial yaitu dengan grup Whatsapp yang beranggotakan semua admin yang ada di semua organisasi pemerintah daerah (OPD). Semisal ada kendala ataupun yang diperlu dipertanyakan terkait aplikasi e-youtefa ataupun mengenai mekanisme penyusunan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah (LPPD), bisa di tanyakan melalui grup whatshaap. Penyaluran informasi mengenai penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) saya akui sudah sangat baik karena admin setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) tepat waktu dalam pengumpulan sesuai waktu yang di tentukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan magang yang telah dilaksanakan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura, serta analisis data, fakta, dan informasi yang terkumpul, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua umumnya sudah berjalan sesuai prinsip dan mekanisme penyusunannya karena adanya dukungan dari aspek sumberdaya yakni sumberdaya manusia pengelola dan fasilitas dukung yang memadai, aspek sikap penyampaian kebijakan dan respon yang cukup baik terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengawasannya serta aspek dukungan struktur birokrasi yang sangat baik terutama dalam mengimplementasi kebijakan berdasarkan Standar

- operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi kebijakan yang membutuhkan koordinasi antar Badan/Organisasi di dalam Birokrasi Pemerintahan Kota Jayapura.
2. Kendatipun Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua umumnya sudah berjalan sesuai prinsip dan mekanisme penyusunannya, akan tetapi, masih ada beberapa masalah pada penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kota Jayapura melalui e-youtefa. Hal ini dapat dilihat dari variabel penentu keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dari hasil wawancara bersama informan, bahwa item komunikasi pada dimensi konsistensi kebijakan dalam melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) melalui e-youtefa belum terlaksana secara efektif dan efisien atau masih belum optimal karena dalam prosesnya masih terdapat beberapa OPD terutama Bagian Tata Pemerintahan pada tingkatan kelurahan yang tidak melakukan proses pengisian data melalui sistem, tapi justru membawa data secara real ke bagian tata pemerintahan.
 3. Faktor penghambat yang turut berpengaruh pada Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua yaitu kurangnya intensitas konsultasi oleh pengelola ditingkat OPD terkait permasalahan penyusunan ke bagian yang berkompeten dalam penyusunan LPPD ini, admin LPPD pada setiap OPD belum cakap melaksanakan pengisian melalui system ini serta factor jaringan juga berpengaruh dalam aplikasi system ini.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa Di Kota Jayapura Provinsi Papua.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Abdul Wahab (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.

Agustino (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Agustinus (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. AIPI.

Arikunto (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*.

Rineka Cipta.

Budiharto (2010) *Robotika – Teori dan Implementasinya*. Penerbit Andi.

Creswell (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. Sage Publication Inc.

Edward III (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Esterberg (2002). *Qualitative Methods Ins Social Research*. McGraw Hill.

B. Undang-Undang

(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2014)

(Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2019)

(Peraturan Walikota Jayapura Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah n.d.)

(Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2020)

C. Jurnal

Akib (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1.

Sabatier (1986). "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. *Journal of Public Policy* 6.